

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET (DPPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2009-2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



**Disusun Oleh:
RENIDIA DEWANTI PUTRI PRIWIKASARI
11409134031**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RENIDIA DEWANTI PUTRI PRIWIKASARI
NIM : 11409134031
Program Studi : Akuntansi D III
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap
Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 25 April 2014
Yang menyatakan,



(Renidia Dewanti Putri Priwikasari)

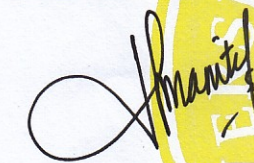
**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET (DPPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2009-2013**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 25 April 2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Ketua Program Studi
Akuntansi Diploma III



Amanita Novi Yushita, M.Si.
NIP. 19770810 200604 2 002

Dosen Pembimbing



Isroah, M. Si
NIP. 19660704 199203 2 003

Disahkan Oleh

Ketua Pengelola

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates



Drs. Bambang Saptono, M. Si.
NIP. 19610723 198803 1 001

TUGAS AKHIR

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2013

Disusun oleh:
Renidia Dewanti Putri Priwikasari
11409134031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi D III
Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Yogyakarta
Pada tanggal 5 Mei 2014 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

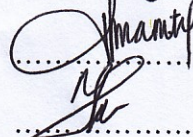
Ketua merangkap anggota

Amanita Novi Yushita, M.Si

Sekretaris merangkap anggota

Isroah, M.Si

Tanda Tangan



Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

Yogyakarta, 4 Juni 2014
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates
Ketua Pengelola,



Drs. Bambang Saptono, M. Si.

NIP. 19610723 198803 1 001

MOTTO

Bissmillahirromaanirrohiim

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”.

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya...”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al Insiroh : 5-8)

“Telah tersedia tempat untukmu di barisan pertama. Yakni, dengan syarat engkau selalu menekuni dan lebih menyempurnakan setiap hal yang engkau kerjakan”

(Dr. ‘Aidh al-Qarni)

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.”

(Thomas A. Edison)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, akhirnya perjalanan panjang yang kujalani ini menghantarkan aku ke gerbang pendidikan yang tinggi. Karya ini aku persembahkan untuk:

- ♥ Kedua orang tuaku, Ibu Wiwiek Yogi Astuti dan Bapak Supriyono atas kasih sayang dan doanya yang tiada pernah putus, juga selalu memberi dukungan moril dan materiil.
- ♥ Setyo Ariatmoko, M. Surraefi, Rosiana Irna, Eni Wulandari, Hasna Amalia, dan Eni Yuli Lestari yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan selalu membantuku ketika mengalami kesulitan.
- ♥ Keluarga besar dan teman-temanku, terima kasih atas doa dan dukungannya.
- ♥ Almamater dan masa depanku.

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2013

Oleh:

Renidia Dewanti Putri Priwikasari
11409134031

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013, (2) Tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal tahun 2009-2013, (3) Hambatan dan upaya di lapangan dalam proses pemungutan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Selain itu analisis ini juga untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan *software* SPSS 19 untuk mengolah data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. (2) Tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal tahun 2009-2013 dalam setiap tahun anggaran realisasi Pajak Daerah dan Belanja Modal melebihi target, sedangkan untuk anggaran realisasi Retribusi Daerah untuk *item-item* tertentu melebihi target, ada beberapa yang tidak. (3) Hambatan dan upaya di lapangan dalam proses pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undang diatasi dengan proses pemahaman mengenai aturan-aturan dalam pemungutan pajak yang lebih ditekankan kepada wajib pajak, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak diatasi dengan cara dengan melakukan inovasi yang selama ini belum pernah dilakukan contohnya mendekatkan pemungut pajak dan retribusi daerah dengan masyarakat.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tugas akhir berjudul: “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013” dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada program Akuntansi Diploma III Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Penyelesaian tugas akhir ini berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Drs. Bambang Saptono, M. Si. selaku Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Amanita Novi Yushita, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Isroah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan nasihatnya selama penyusunan tugas akhir.
7. Bapak ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya jurusan Akuntansi D3 yang telah memberikan ilmu dan pelayanan kepada penulis.

8. R. Aj. Purnomosari Dyah Nurmaya Gondhohastuti, S.E., M.Si. selaku Kasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi
9. Bapak ibu pegawai dan staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, khususnya bidang Anggaran Pendapatan yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data kepada penulis.
10. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mendoakan, memberi nasihat, bimbingan, dan semangat serta memberi dukungan baik secara rohani dan materi sehingga saya mampu berkuliah dan menyusun tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa membantu baik moral maupun materi sehingga penyusun dapat melanjutkan penyusunan tugas akhir ini hingga selesai pada akhirnya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 25 April 2014

Penyusun



(Renidia Dewanti Putri Priwikasari)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11

A. Deskripsi Teori	11
1. Belanja Modal	11
a. Belanja Modal Tanah	12
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13
e. Belanja Modal Fisik dan Lainnya	13
2. Pajak Daerah	13
a. Pengertian Pajak Daerah	13
b. Dasar Hukum	14
c. Jenis Pajak Daerah	14
1) Pajak Provinsi	14
2) Pajak Kabupaten atau Kota	15
d. Objek dan Tarif Pajak Daerah	15
e. Cara Penghitungan Pajak Daerah	16
3. Retribusi Daerah	16
a. Pengertian Retribusi Daerah	16
b. Dasar Hukum	17
c. Jenis Pemungutan Retribusi Daerah	17
1) Jasa Umum	17
2) Jasa Usaha	19
3) Retribusi Perizinan Tertentu	20
d. Cara Penghitungan Retribusi Daerah	21

B. Kerangka Berpikir	22
C. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian	23
1. Hipotesis Penelitian	23
2. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Tempat dan Waktu Penelitian	25
1. Tempat Penelitian	25
2. Waktu Penelitian	25
B. Subjek dan Objek Penelitian	25
1. Subjek Penelitian	25
2. Objek Penelitian	25
C. Definisi Operasional Variabel	25
1. Belanja Modal	26
2. Pajak Daerah	26
3. Retribusi Daerah	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
1. Wawancara	27
2. Dokumentasi	28
E. Teknik Analisis Data	28
1. Regresi Linier Sederhana	28
2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	29
3. Koefisien Determinasi (R^2)	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31

A. Data Umum	31
1. Sejarah dan Profil DPPKA DIY	31
2. Visi dan Misi DPPKA DIY	34
a. Visi	34
b. Misi	34
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi DPPKA DIY	34
a. Kedudukan DPPKA DIY	35
b. Tugas DPPKA DIY	35
c. Fungsi DPPKA DIY	35
4. Tujuan dan Sasaran DPPKA DIY	37
a. Tujuan DPPKA DIY	37
b. Sasaran yang Hendak Dicapai	37
5. Struktur dan Bagan Organisasi DPPKA DIY	39
6. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang DPPKA DIY	40
a. Sekretariat	40
b. Bidang Anggaran Pendapatan	43
c. Bidang Anggaran Belanja	45
d. Bidang Pengelolaan Kas Daerah	46
e. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah	48
f. Bidang Akuntansi	50
g. Bidang Pengelolaan Barang Daerah	51
7. Sumber Daya Manusia DPPKA DIY	52
8. Analisis Isu-isu Strategis	54

a. Peluang	54
b. Tantangan	55
c. Isu Strategis	55
B. Data Khusus	56
1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY tahun 2009-2013....	56
2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY tahun 2009-2013	56
3. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY tahun 2009-2013..	57
C. Analisis Data	57
1. Analisis Regresi Linier Sederhana	57
a. Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	58
b. Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	59
2. Pengujian Hipotesis	60
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	60
1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	60
2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	60
b. Koefisien Determinasi (R^2)	61
1) Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	61
2) Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	62
D. Pembahasan	62
1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	62
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	63
3. Tingkat Pencapaian Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal	64

4. Hambatan di Lapangan dalam Proses Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DIY	65
5. Upaya Mengatasi Hambatan di Lapangan dalam Proses Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DIY	66
E. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi DPPKA DIY	39

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Objek dan Tarif Pajak Daerah	15
2. Kepegawaian DPPKA DIY	39
3. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY tahun 2009-2013	56
4. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY tahun 2009-2013	56
5. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY tahun 2009-2013...	57
6. Hasil Estimasi Regresi Pajak Daerah	58
7. Hasil Estimasi Regresi Retribusi Daerah	59
8. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Pajak Daerah	61
9. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Retribusi Daerah	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Ijin Survei Tugas Akhir	73
2. Surat Ijin Penelitian dari Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	74
3. Jabatan Struktural DPPKA DIY	75
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 dan 2008	77
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2010 dan 2009	79
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011 dan 2010	81
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2012 dan 2011	83

8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012	85
9. Hasil Estimasi Regresi Linier Sederhana Menggunakan SPSS <i>Statistics 19</i>	88
10. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Menggunakan SPSS <i>Statistics 19</i>	89
11. Analisis Data Manual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	90
12. Tabel t dan r <i>Product Moment</i> dengan Signifikansi 5%	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan berimplikasi pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan peristiwa masa lalu.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah

satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 dalam Rudy Badrudin (2012: 61), belanja modal adalah anggaran pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011: 12-15).

Lebih lanjut lagi Marihot Pahala Siahaan (2010: 5-9) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sebagaimana dimuat dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektivitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan. Dengan perubahan Undang-Undang PDRD Tahun 2009 memberikan kewenangan

kepada daerah untuk memungut 11 jenis pajak yaitu empat jenis pajak untuk tingkat provinsi dan tujuh jenis pajak untuk tingkat kabupaten/ kota. Namun kabupaten atau kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam pemungutan retribusi, undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/ kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang PDRD diadakan perubahan dengan beberapa dasar pertimbangan. Dengan pertimbangan tersebut dilakukannya perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena memudahkan penyesuaian pendapatannya yang sejalan dengan peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (Waluyo, 2011: 235-236).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan

daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dala APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Anggito Abimanyu, 2005). Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan

sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Adanya perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah setelah diperkenalkannya Kebijakan Ekonomi Daerah.
2. Munculnya hambatan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Ketidaksesuaian pengalokasian belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada kebutuhan daerah.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak menyimpang dari judul Tugas Akhir, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus pada sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal tahun 2009-2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas sebelumnya maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013?
2. Bagaimanakah pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013?
3. Bagaimanakah tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013?
4. Apa sajakah yang menjadi hambatan dan upaya di lapangan dalam proses pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013.
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013
3. Tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013.

4. Hambatan dan upaya di lapangan dalam proses pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diambil selama bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya, khususnya kepada obyek yang diteliti.

b. Bagi DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal.
- 2) Menyediakan informasi mengenai pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal dalam kurun waktu 2009-2013.

3) Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah selanjutnya. Selain itu juga dapat memberikan referensi bagi pihak yang berkepentingan dan berminat dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang perpajakan berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, adalah belanja barang atau jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (Rudy Badrudin, 2012: 61).

Menurut Abdul Halim (2008: 4-5) dalam Rudy Badrudin (2012), belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Abdul Halim (2007: 113-114) dalam Rudy Badrudin (2012), belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta

inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian dan peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. **Belanja Modal Fisik Lainnya**

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan atau pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Erly Suandy:

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (Erly Suandy, 2005: 232).

b. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Pajak Daerah antara lain:

- 1) UU No. 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
- 2) UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

c. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah dirinci menjadi:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas: Tarif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air

Permukaan, dan Pajak Rokok ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jenis Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2011 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok

d. Objek dan Tarif Pajak Daerah

Tabel 1. Objek dan Tarif Pajak Daerah

		Tarif Tertinggi
Pajak Daerah Tingkat I		
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air	Kepemilikan 1	2%
	Kepemilikan 2	10%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan 1	20%
	Penyerahan 2	1%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		10%
4. Pajak Air Permukaan		10%
5. Pajak Rokok		10%
Pajak Daerah Tingkat II		
1. Pajak Hotel		10%
2. Pajak Restoran		10%
3. Pajak Hiburan		35%
4. Pajak Reklame		25%
5. Pajak Penerangan Jalan		10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		25%
7. Pajak Parkir		30%
8. Pajak Air Tanah		20%

9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,3%
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

e. Cara Penghitungan Pajak Daerah

Adapun cara penghitungan pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam Undang-Undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah (Waluyo, 2011: 241).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

b. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Retribusi Daerah antara lain:

- 1) UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

c. Jenis Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi dilakukan terhadap objek retribusi yaitu:

1) Jasa Umum

Retribusi jasa umum yang dikenakan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagai objek atas retribusi jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yaitu: retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan; retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta

catatan sipil; retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; retribusi penggantian biaya cetak peta; retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; retribusi pengelolaan limbah cair; retribusi pelayanan tera ulang; retribusi pelayanan pendidikan; dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi umum dimaksud dapat juga tidak dipungut bila ternyata potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk membelikan pelayanan secara cuma-cuma.

Kriteria retribusi jasa umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi,

di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum

- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik

2) Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ini dikenakan atas jasa usaha sebagai objek retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan atau
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kategori jasa usaha dalam hal ini adalah retribusi pemakaman kekayaan daerah; retribusi pasar grosir dan atau

pertokoan; retribusi tempat pelanggan; retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa; retribusi rumah potong hewan; retribusi pelayanan kepelabuhan; retribusi tempat rekreasi dan olahraga; retribusi penyeberangan di air; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu ini meliputi: retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi izin gangguan; retribusi izin trayek; dan retribusi izin perikanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

d. Cara Penghitungan Retribusi Daerah

Adapun cara penghitungan retribusi daerah sebagai berikut:

$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan:

- 1) Kuantitas penggunaan jasa
- 2) Ditaksir dengan rumus

Tarif retribusi diukur dengan:

- 1) Nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan
- 2) Dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif

B. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah seringkali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi

melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pemungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

C. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian

1. Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara dari rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian. Hipotesis dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

a. Hipotesis untuk Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013.

H0 : Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013.

b. Hipotesis untuk Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

H1 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013.

H0 : Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013.

Pengambilan keputusan:

Jika signifikan $> 0,05$, maka H1 ditolak berarti variabel independen tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen.

Jika signifikan $< 0,05$, maka H1 diterima berarti variabel independen ada pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa sajakah yang menjadi hambatan dan upaya di lapangan dalam proses pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimanakah tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari dan April 2014.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian : Staff Kantor di DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Objek Penelitian : Laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal dalam kurun waktu 2009-2013.

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah belanja modal sedangkan variabel independennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut ini pembahasan definisi operasional dan pengukuran dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi (menambah aset) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset fisik lainnya. Belanja modal untuk masing-masing kabupaten atau kota dapat dilihat dari pos belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Variabel ini diukur melalui besarnya anggaran pajak daerah kabupaten atau kota pada setiap tahun anggaran dalam Laporan APBD. Pajak daerah untuk masing-masing kabupaten atau kota dapat dilihat dari pos pajak daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Retribusi daerah untuk masing-masing kabupaten atau kota dapat dilihat dari pos retribusi daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang memberikan data atau terlibat langsung dengan pihak yang akan diteliti tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang pada akhirnya akan menjadi data umum dalam pembuatan penelitian ini. Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini adalah:

- a) Sejarah dan profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
- b) Visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
- c) Kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
- d) Tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
- e) Struktur dan bagan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
- f) Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

- g) Sumber daya manusia Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
- h) Analisis isu-isu strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen. Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh:

- a) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b) Data Belanja Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013
- c) Data realisasi penerimaan Pajak Daerah di DIY selama kurun waktu 2009-2013
- d) Data realisasi penerimaan Retribusi Daerah di DIY selama kurun waktu 2009-2013

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Regresi Linier Sederhana

Menurut Gujarati (2003) dalam Imam Ghozali (2011: 95), regresi linier sederhana pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel independen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Tabanick, 1996).

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a = intersep

b = koefisien regresi

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Imam Ghozali (2011: 98-99), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sedangkan semakin kecil nilai R^2 berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi R^2 adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen (Imam Ghozali, 2006 dalam Hasna Amalia).

Dengan hasil analisis di atas maka akan dapat dipaparkan secara logis dan sistematis berbagai data yang diperoleh sehingga akan memberikan gambaran yang utuh terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Sejarah dan Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Propinsi DIY yang mendasari terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DIY dibentuk berdasarkan Perda Pemerintah Daerah DIY Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan

Pemerintah DIY. Adapun kronologis sampai terbentuknya DPPKA dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan masih dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto sampai tahun 1984, sedangkan pada tahun 1985 s/d 1995 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Sumaryono kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak Drs. Suyud dari tahun 1995 s/d 1997. Selanjutnya Biro Keuangan dipimpin oleh Bapak Drs. Mulyanto dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2008 dibawah pimpinan Bapak Drs. Mulyanto, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda DIY. Bapak Drs. Bambang Wisnu Handoyo mulai dari tanggal 14 Februari 2008 memimpin BPKD sampai sekarang, yang namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY sejak 15 Februari tahun 2009.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

DPPKA DIY dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas membawahi Subbag Umum, Subag

Program, Subag Data & TI. Dalam menjalankan tugasnya Kepala DPPKA DIY dibantu oleh 6 bidang yang meliputi: Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan dibantu oleh UPTD yaitu KPPD 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Bidang Anggaran Pendapatan membawahi 3 seksi antara lain Seksi Pajak Daerah, Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Seksi Perimbangan Keuangan Daerah. Bidang Anggaran Belanja membawahi 4 Seksi antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, dan Seksi Perekonomian. Bidang Pengelolaan Kas Daerah membawahi 4 Seksi antara lain: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, dan Seksi Perekonomian. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah membawahi 3 Seksi antara lain: Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten atau Kota, Seksi Bina Pengelolaan Keuangan, dan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD. Bidang Akuntansi membawahi 4 Seksi antara lain: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan rakyat, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, serta Seksi Perekonomian. Bidang Pengelolaan Barang Daerah membawahi 3 Seksi yakni Seksi Administrasi Barang Daerah, Seksi Pendayagunaan Barang Daerah, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) menyebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota pembentukannya dipimpin oleh Kepala KPPD yang masing-masing membawahi 1 Kasubag dan 2 Kasi antara lain: Kasubag Tata Usaha, Kasi Pendaftaran dan Penetapan, serta Kasi Pembukuan dan Penagihan.

2. Visi dan Misi DPPKA DIY

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY memiliki visi:

“Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tahun 2013 di Indonesia.”

b. Misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY memiliki misi:

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah
- 3) Meningkatkan pengelolaan aset daerah
- 4) Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi DPPKA DIY

Mengacu pada Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan DPPKA

- 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- 2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas DPPKA

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah.

c. Fungsi DPPKA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah.
- 3) Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
- 4) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan.
- 6) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kabupaten atau kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- 7) Pengelolaan kas daerah dan akuntansi.
- 8) Penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan barang daerah.
- 9) Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah
- 10) Pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah.
- 11) Pelaksanaan penelitian dan optimalisasi barang daerah.
- 12) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah.

- 13) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).
- 14) Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah.
- 15) Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah.
- 16) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- 17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

4. Tujuan dan Sasaran DPPKA DIY

a. Tujuan DPPKA DIY

- 1) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi
- 2) Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- 3) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal
- 4) Mewujudkan peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

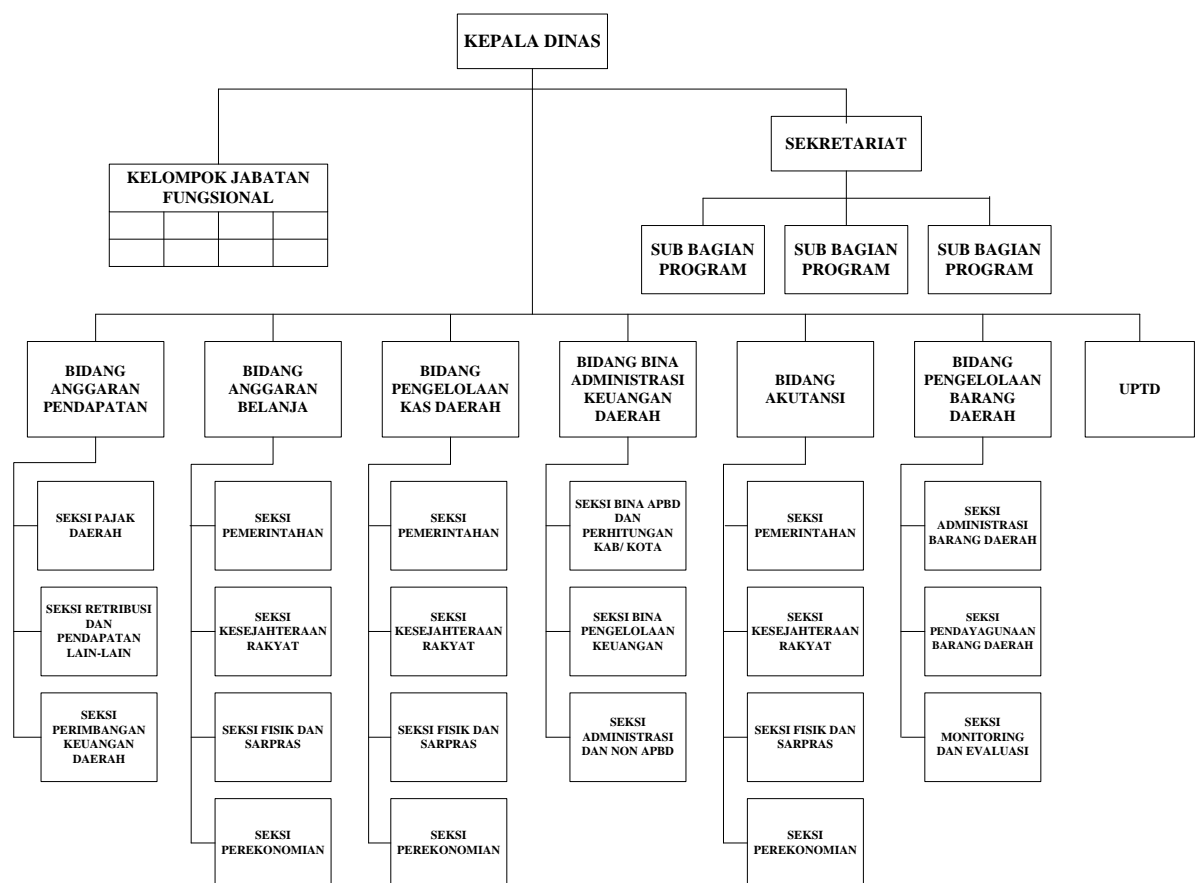
b. Sasaran yang Hendak Dicapai

- 1) Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yng optimal

- 2) Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien
- 3) Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien
- 4) Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis Teknologi Informasi
- 5) Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi
- 6) Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan
- 7) Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
- 8) Terwujudnya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang optimal
- 9) Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6% pertahun
- 10) Terwujudnya tertib administrasi asset
- 11) Terwujudnya legalitas asset
- 12) Terwujudnya pendayagunaan asset
- 13) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasaran
- 14) Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
- 15) Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset
- 16) Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan

5. Struktur dan Bagan Organisasi DPPKA DIY

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh 6 bidang yang meliputi: Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota.



YOGYAKARTA, 1 FEBRUARI 2014

Gambar. 1. Struktur Organisasi DPPKA DIY

6. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang DPPKA DIY

Tugas dan Fungsi Sekretariat dan bidang pada DPPKA ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Sekretariat.
- 2) Penyusunan program Dinas.
- 3) Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas.
- 4) Penyelenggaraan kepegawaian Dinas.
- 5) Pengelolaan keuangan dan barang Dinas.
- 6) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.
- 7) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan.
- 8) Fasilitas pengembangan kerjasama teknis.
- 9) Evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program Sub Bagian Umum
- b) Pengelolaan kearsipan
- c) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
- d) Pengelolaan barang Dinas
- e) Pengelolaan data kepegawaian Dinas
- f) Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas
- g) Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas
- h) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas
- i) Penyelenggaraan kehumasan Dinas
- j) Pengelolaan kepustakaan Dinas
- k) Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas
- l) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan laporan kinerja, serta pengelolaan keuangan.

Untuk Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program Sub Bagian Program
 - b) Penyusunan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
 - c) Penyiapan rencana anggaran
 - d) Penyelenggaraan perbendaharaan
 - e) Penyelenggaraan akuntansi keuangan
 - f) Penyelenggaraan verifikasi anggaran
 - g) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran
 - h) Pengendalian, monitoring dan evaluasi program
 - i) Penyusunan laporan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
 - j) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Program
- 3) Sub Bagian Data dan Teknologi

Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi

- b) Pengolahan data dan pelayanan informasi pengolahan keuangan daerah
- c) Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- d) Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi

b. Bidang Anggaran Pendapatan

Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta dana perimbangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Anggaran pendapatan
- 2) Perumusan perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan
- 3) Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, dan penerimaan dana perimbangan
- 4) Penelitian dan pengkajian intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 5) Koordinasi penyelenggaraan pemungutan, penagihan, pemasukan dan pengumpulan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan dana perimbangan.

- 6) Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan penyusunan laporan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain
- 7) Koordinasi pengelolaan pelaksanaan dana perimbangan, penyelesaian sengketa pajak
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Anggaran Pendapatan

Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari:

1) Seksi Pajak Daerah

Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan fasilitasi sengketa pajak daerah.

2) Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan pemungutan, administrasi pendapatan yang bersumber dari retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3) Seksi Perimbangan Keuangan Daerah

Seksi Perimbangan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan dana perimbangan.

c. Bidang Anggaran Belanja

Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas menyusun APBD dan atau perubahan APBD, Anggaran Kas Pemerintah Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Anggaran Belanja
- 2) Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD
- 3) Perumusan kebijakan perencanaan APBD dan penyediaan dana
- 4) Koordinasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Anggaran Belanja
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Anggaran Belanja terdiri dari:

1) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang pemerintahan.

2) Seksi Kesejahteraan rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang kesejahteraan rakyat.

3) Seksi Fisik dan Sarana Prasarana

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang fisik dan sarana prasarana.

4) Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang perekonomian.

d. Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menghimpun data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya, melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran APBD, mengendalikan pelaksanaan keuangan APBD, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program Bidang Pengelolaan Kas Daerah

- 2) Perumusan kebijakan pengelolaan kas daerah
- 3) Penyusunan kebutuhan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 4) Koordinasi pelaksanaan Potongan Fihak Ketiga (PFK)
- 5) Koordinasi pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran atas beban kas daerah
- 6) Penatausahaan keuangan daerah dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 7) Pengendalian pelaksanaan APBD
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya

Bidang Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari:

- 1) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Fihak Ketiga (PFK) di bidang pemerintahan.

- 2) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian

pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Fihak Ketiga (PFK) di bidang kesejahteraan rakyat.

3) Seksi Fisik dan Sarana Prasarana

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Fihak Ketiga (PFK) di bidang fisik dan sarana prasarana.

4) Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Fihak Ketiga (PFK) di bidang perekonomian.

e. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah

Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD Kabupaten/Kota, pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan dana non APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bina Adminstrasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
- 2) Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota

- 3) Pengkoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten/Kota
- 4) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 5) Perumusan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- 6) Penyusunan laporan realisasi keuangan dana non-APBD
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari:

- 1) Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten atau Kota
Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten atau Kota mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- 2) Seksi Bina Pengelolaan Keuangan
Seksi Bina Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD
Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan dana non APBD.

f. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Akuntansi
- 2) Koordinasi penyusunan laporan realisasi semesteran dan prognosis
- 3) Koordinasi penyusunan laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- 4) Perumusan kebijakan akuntansi
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Akuntansi
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- 1) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bidang pemerintahan.

- 2) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

bidang kesejahteraan rakyat.

3) Seksi Fisik dan Sarana Prasarana

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bidang fisik dan sarana prasarana.

4) Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bidang perekonomian.

g. Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai tugas merencanakan, menatausahakan, mengamankan, menilai, memanfaatkan dan mendayagunakan, monitoring dan evaluasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengelolaan barang milik daerah serta merumuskan bahan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Pengelolaan Barang Daerah
- 2) Perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
- 3) Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah
- 4) Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan barang milik daerah
- 5) Perumusan kebijakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- 6) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan program Bidang Pengelolaan Barang Daerah
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari:

- 1) Seksi Administrasi Barang Daerah

Seksi Administrasi Barang Daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi barang milik daerah.

- 2) Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

Seksi Pendayagunaan Barang Daerah mempunyai tugas memanfaatkan dan mendayagunakan barang milik daerah.

- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi, penatausahaan dan penghapusan, pembinaan pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

7. Sumber Daya Manusia DPPKA DIY

Keadaan Kepegawaian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY terdiri dari Pejabat eselon 2 berjumlah 1 orang yakni selaku Kepala Dinas DPPKA DIY. Pejabat eselon 3 berjumlah 7 orang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran

Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran Belanja, Kepala Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah. Pejabat eselon 4 berjumlah 24 orang yang terdiri dari Kepala Subbidang dan Kepala Seksi pada tiap-tiap bidang DPPKA.

Jabatan fungsional berdasarkan SK pegawai fungsional meliputi 204 orang yang meliputi Kantor Induk dan KPPD di Kabupaten atau Kota. Untuk Kantor Induk mulai dari Sekretariat berjumlah 25 orang masing-masing menyebar di Bagian Umum, Sub Bagian Program, Sub Bagian Data dan TI. Untuk Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari 3 seksi dan 12 jabatan fungsional, Bidang Anggaran Belanja terdiri dari 4 seksi dan 17 jabatan fungsional, Bidang Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari 4 seksi dan 16 jabatan fungsional, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari 3 seksi dan 11 jabatan fungsional, Bidang Akuntansi meliputi 4 seksi dan 14 jabatan fungsional sedangkan Bidang Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari 3 seksi dan 17 pejabat fungsional.

Pejabat eselon 3 pada UPTD sebanyak 5 orang terdiri dari Kepala KPPD Kota, Kepala KPPD Bantul, Kepala KPPD Kulonprogo, Kepala KPPD Gunungkidul dan Kepala KPPD Sleman, sedangkan pejabat eselon 4 ada 3 orang dimasing-masing KPPD Kabupaten atau Kota yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan dan Penagihan.

Untuk Kepala UPTD terdiri dari 1 kepala kantor dan 3 orang pejabat eselon 4 yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan dan Penagihan. Jabatan fungsional untuk kota 22 orang jabatan fungsional, Bantul 21 orang jabatan fungsional, Kulonprogo 14 orang jabatan fungsional, Kabupaten Gunungkidul 14 orang jabatan fungsional dan Kabupaten Sleman sebanyak 30 untuk jabatan fungsional.

Tabel 2. Kepegawaian DPPKA DIY

Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Kepala KPPD	Fungsional Umum	Jumlah
1 orang	1 orang	6 orang	24 orang induk	4 orang	104 induk	141 orang
			15 orang KPPD		101 KPPD	116 orang
Total Pegawai						257 orang

8. Analisis Isu-isu Strategis

a. Peluang

- 1) Kinerja perekonomian DIY yang positif selama beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif
- 2) Kinerja pemerintah yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Peningkatan pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah

- 3) Adanya peraturan perundangan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah
- 4) Tersedianya potensi sumber-sumber pendapatan PAD
- 5) Kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB
- 6) Adanya pelayanan samsat dengan sistem *online*

b. Tantangan

- 1) Kebijakan otonomi daerah berdampak penurunan animo masyarakat luar daerah untuk studi DIY
- 2) Krisis finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha dan menimbulkan potensi PHK masal serta penurunan perekonomian DIY
- 3) Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan
- 4) Optimalisasi aset daerah yang berdaya guna dan berdaya guna yang merupakan potensi PAD
- 5) Regulasi yang mantap dalam hal pengelolaan keuangan daerah
- 6) Melakukan identifikasi, mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah
- 7) Profesionalisme SDM di bidang teknologi informasi, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Penilaian Aset

c. Isu Strategis

- 1) Ketahanan Kinerja PDRB terhadap krisis finansial global
- 2) Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak

- 3) Optimalisasi pemanfaatan asset
- 4) Potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus harus digali sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

B. Data Khusus

Untuk mengetahui Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal tahun 2009-2013, maka diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY tahun 2009-2013.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY tahun 2009-2013

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	221.047.031.944,00	192.938.051.429,00
2010	159.635.786.548,00	123.424.755.631,00
2011	160.781.913.476,00	142.793.832.978,00
2012	280.079.329.823,50	216.419.982.440,00
2013	413.179.214.341,00	369.395.794.039,00

2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY tahun 2009-2013.

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY tahun 2009-2013

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	494.847.565.500,00	541.192.265.769,60
2010	539.653.461.500,00	634.710.019.496,80
2011	655.306.917.953,00	735.226.105.916,20
2012	805.095.980.000,00	871.630.605.393,00
2013	1.021.820.720.000,00	1.063.314.117.923,00

3. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY tahun 2009-2013.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY tahun 2009-2013

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	32.591.963.785,00	34.785.228.680,57
2010	31.556.968.029,00	32.836.503.243,89
2011	33.575.099.081,00	35.985.658.458,15
2012	32.149.648.150,00	34.115.157.619,03
2013	35.715.599.098,00	38.043.014.004,85

C. Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Selain itu analisis ini juga untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel independen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Hasil uji regresi linear sederhana dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

a. Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Pajak Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.985E10	1.237E11		-.726	.520
Pajak_Daerah	.389	.156	.820	2.483	.089

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah (April 2014)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$BM = -89.850.000.000 + 0,389 PD$$

Persamaan regresi di atas menyatakan bahwa:

- 1) Konstanta sebesar -89.850.000.000 artinya apabila pajak daerah daerah konstan maka belanja modal akan bernilai -89.850.000.000. Nilai negatif pada konstanta tersebut menunjukkan arah perubahan nilai belanja modal yaitu mengalami penurunan.
- 2) Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,389 artinya apabila pajak daerah meningkat sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar 0,389 satuan.

b. Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 7. Hasil Estimasi Regresi Retribusi Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.152E12	6.154E11		-1.872	.158
Retribusi_Daerah	38.713	17.485	.788	2214	.114

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah (April 2014)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$BM = -1.152.000.000.000 + 38,713 RD$$

Persamaan regresi di atas menyatakan bahwa:

- 1) Konstanta sebesar -1.152.000.000.000 artinya apabila pajak daerah daerah konstan maka belanja modal akan bernilai -1.152.000.000.000. Nilai negatif pada konstanta tersebut menunjukkan arah perubahan nilai belanja modal yaitu mengalami penurunan.
- 2) Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 38,713 menyatakan bahwa apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar 38,713 satuan.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk mengetahui secara detail pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan pengujian secara parsial dengan uji t.

1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,389 dan nilai probabilitas sebesar 0,089. Karena nilai probabilitas ini lebih dari taraf signifikansi 0,05 artinya pajak daerah secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan **“pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal” ditolak.**

2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 38,713 dan nilai probabilitas sebesar 0,114. Karena nilai probabilitas ini lebih dari taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan **“retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal” ditolak.**

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Untuk regresi dengan dua variabel independen atau lebih, digunakan *adjusted R-square* sebagai koefisien determinasi. Dari pengujian ini dapat diketahui tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*) nya.

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

1) Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 8. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Pajak Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.673	.564	6.41761E10

a. Predictors: (Constant), Pajak_Daerah
Sumber: Data diolah (April 2014)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel 8, besarnya *adjusted R-square* adalah 0,564. Hal ini berarti 56,4% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh satu variabel independen yaitu pajak daerah. Sedangkan

sisanya sebesar 43,6% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar model.

2) Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 9. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Retribusi Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.620	.494	6.91135E10

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah

Sumber: Data diolah (April 2014)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel 9, besarnya *adjusted R-square* adalah 0,494. Hal ini berarti 49,4% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh satu variabel independen yaitu retribusi daerah. Sedangkan sisanya sebesar 50,6% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar model.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama

ditolak. Penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian Hasna Amalia (2013) yang meneliti PAD tanpa memisahkan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika PAD (salah satunya adalah pajak daerah) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana dan pembangunan guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Sianturi (2010). Di dalam penelitiannya menyebutkan jika pajak daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Penelitian ini sebanding dengan penelitian Hasna Amalia (2013) dan tidak sebanding dengan penelitian Sumarmi (2009). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU 28 tahun 2009). Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Sianturi (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial retribusi daerah

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Titik tekan dari retribusi daerah adalah adanya imbalan langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun dalam praktik di lapangan, masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. Masih ada ketidakcocokan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima. Masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja atau bahkan masih buruk kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, retribusi daerah sebagai salah satu PAD belum memberikan kontribusi yang cukup untuk belanja modal.

3. Tingkat Pencapaian Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Dibandingkan dengan Target yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013

Dalam setiap tahun anggaran realisasi pajak daerah dan belanja modal melebihi target, sedangkan untuk anggaran realisasi retribusi daerah untuk *item-item* tertentu melebihi target, ada beberapa yang tidak. Kelebihan tersebut didasari oleh faktor-faktor yang tidak pernah terpikirkan, contohnya mengenai pajak daerah khususnya dari biaya balik nama yang hubungannya dengan pola konsumtif masyarakat akan kebutuhan yang di luar perkiraan.

4. Hambatan di Lapangan dalam Proses Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hambatan bukanlah hal yang baru muncul dalam pelaksanaan kegiatan, begitu juga dengan pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam proses pelaksanaannya pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami beberapa hambatan, diantaranya adalah:

- a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Dalam melaksanakan *tax reform* lebih susah dan memakan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang. Apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak, bahkan bagi sebagian orang, pemungutan pajak dirasa sebagai suatu pemaksaan. Memang ketika membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, namun perlu kita ketahui bahwa kewajiban untuk membayar pajak tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, yang artinya

bahwa pemungutan pajak tersebut tidak lain diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk wajib pajak tersebut.

5. Upaya Mengatasi Hambatan di Lapangan dalam Proses Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Adanya beberapa hambatan tersebut mendorong Pemerintah Daerah melakukan suatu tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Sehingga kini Pemerintah Daerah telah melakukan suatu tindakan nyata agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat terealisasi semakin maksimal, tindakan tersebut antara lain:

- a. Proses pemahaman mengenai aturan-aturan dalam pemungutan pajak lebih ditekankan kepada wajib pajak mengingat pemahaman masing-masing individu yang berbeda-beda, sehingga untuk memahami masyarakat tentang pajak dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan terhadap wajib pajak pusat maupun daerah. Kegiatan penyuluhan tersebut berbentuk sosialisasi mengenai pendapatan pusat dan daerah serta memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendapatan pusat dan daerah bagi masyarakat dan negara.
- b. Jemput bola yaitu dengan melakukan inovasi yang selama ini belum pernah dilakukan contohnya mendekatkan pemungut pajak dan retribusi daerah dengan masyarakat. Pendekatan ini dikondisikan dengan keadaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Salah satunya

yaitu dengan membuka *counter* di pusat keramaian. Jadi apabila ada wajib pajak yang akan membayar pajak tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor pajak cukup dengan mendatangi lokasi terdekat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya inovasi tersebut secara tidak langsung akan menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk wajib pajak tersebut.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis masih mendapatkan keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Keterbatasan tersebut adalah terdapatnya data untuk tahun 2013 yang belum dilakukan audit secara keseluruhan oleh BPK sehingga penulis menggunakan data yang ada sebelum dilakukan pengauditan oleh BPK.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, tidak akan mempengaruhi belanja modal.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, tidak akan mempengaruhi belanja modal.
3. Tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal tahun 2009-2013 dalam setiap tahun anggaran realisasi Pajak Daerah dan Belanja Modal melebihi target, sedangkan untuk anggaran realisasi Retribusi Daerah hanya *item-item* tertentu melebihi target, ada beberapa yang tidak.
4. Hambatan dan upaya di lapangan dalam proses pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undang diatasi dengan proses pemahaman mengenai aturan-aturan dalam pemungutan pajak yang lebih ditekankan kepada wajib pajak, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak diatasi dengan cara dengan melakukan

inovasi yang selama ini belum pernah dilakukan contohnya mendekatkan pemungut pajak dan retribusi daerah dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang relevan, misalnya tahun 2008-2013.
2. Penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi belanja modal, misalnya jenis-jenis atau ukuran penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak tentu membutuhkan belanja modal lebih banyak yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik daripada daerah dengan jumlah penduduk sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dapan dkk. (2010). *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Darwanto dan Yustikasari. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Symposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin Makasar, Hal. 1-25.
- Erly Suandy. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fajar Nugroho. (2012). “*Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*”. *Skripsi tidak diterbitkan*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasna Amalia. (2013). “*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal*”. *Skripsi tidak diterbitkan*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Imam Ghazali (2006). “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 4*”. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- _____. (2011). “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*”. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Noegroho Boedjioewono. (2007). *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1999 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rudy Badrudin. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sianturi. (2010). *“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Siti Resmi. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Valentina Sri Sumardiyanti dan Aji Suryo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES**

Alamat : Jalan Bhayangkara No.7 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Telepon/Fax : (0274) 773906

Nomor : 029/UN34.38/DT/2014
Hal : Izin Survei Tugas Akhir

09 Januari 2014

Kepada
Yth. Kepala DPPKA Yogyakarta
Jl. Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Di Yogyakarta

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka mencari data sebagai bahan untuk penulisan tugas akhir mahasiswa kami Program Studi D-3 Akuntansi FE UNY Kampus Wates bermaksud mengadakan survei/penelitian dengan judul :

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tujuan yang akan dicapai dalam Penulisan Tugas Akhir adalah untuk melatih mahasiswa untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan praktis sesuai dengan bidang keahliannya serta menuangkannya dalam suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Daftar mahasiswa dan dosen pembimbing sebagai berikut:

No.	Nama & NIP/ NIM	Keterangan
1.	Isroah, M.Si / NIP. 196607041992032003	Dosen Pembimbing
2.	Renidia Dewanti Putri P/ NIM. 11409134031	Mahasiswa

Untuk itu mohon berkenan mengijinkan mahasiswa kami melakukan survei di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.



Ketua Pengelola,

[Signature]
Rambang Saptono, M.Si.
NIP. 196107231988031001



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/289/1/2014

Membaca Surat : **KETUA PENGELOLA DIII AKUNTANSI UNY** Nomor : **029/UN.34.38/DT/2014**
Tanggal : **9 JANUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RENIDIA DEWANTI PUTRI P** NIP/NIM : **11409134031**
Alamat : **FAKULTAS EKONOMI, DIII AKUNTANSI, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY**
Waktu : **17 JANUARI 2014 s/d 17 APRIL 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap instansi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **17 JANUARI 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
3. KETUA PENGELOLA DIII AKUNTANSI UNY, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- ④. YANG BERSANGKUTAN

Notice: Undefined variable: \$rmstembusan in /opt/lampp/htdocs/stargazer/application/modules/pzn/controllers/IzinController.php on line 180

JABATAN STRUKTURAL DPPKA DIY

No.	JABATAN	NAMA
1	Kepala Dinas PPKA DIY	Drs. Bambang Wisnu Handoyo
2	Sekretaris	Dra. Elisabeth Ani Marsiati, M.Si
	Kasubbag Umum	Drs. Mochamad Setiawan
	Kasubbag Program	Erna Dyah Mumpuni, SET
	Kasubbag Data dan TI	Dra. Daruratmi Ratna Pamungkas
3	Kabid Anggaran Pendapatan	Gamal Suwantoro, S.H
	Kasi Pajak Daerah	Drs. Widiyanto
	Kasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	R. Aj. Purnomosari Dyah Nurmaya Gondhohastuti, S.E., M.Si.
	Kasi Perimbangan Keuangan Daerah	Supriyanto, S.E
4	Kabid Anggaran Belanja	Aris Eko Nugroho, SP., M.Si.
	Kasi Pemerintahan	Bagiya Rakhmadi, S.H
	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Prambudi Setiono. B.Ac
	Kasi Fisik dan Sarana Prasarana	Samin, S.T
	Kasi Perekonomian	Amin Purwani, S.H, M.Ec.Dev
5	Kabid Pengelolaan Kas Daerah	Dra. Sri Purwaningsih
	Kasi Pemerintahan	Ari Sasongko, S.E., MM
	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Elisabeth Rully Marsianti, S.H., M.Ec.Dev
	Kasi Fisik dan Sarana Prasarana	Darmasto, B.Sc
	Kasi Perekonomian	Pramana, S.H., MM
6	Kabid Bina Administrasi Keuangan Daerah	Dewa Isnu Broto Imam Santoso, S.H
	Kasi Bina Administrasi Keuangan Daerah	Indarti Sri Untari Merdekawati, S.E
	Kabid Bina APBD dan Perhitungan Kab/ Kota	Antonius Wismandi Nugroho, S.E
	Kasi Administrasi Dana Non APBD	Yulianto, S.IP
7	Kabid Akuntansi	Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.
	Kasi Pemerintahan	Musiran, SIP., M.Si.
	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Cahyaningtyas Ary Wijayanti, S.E., Ak

	Kasi Fisik dan Sarana Prasarana	Endrawati Utami. S.E
	Kasi Perekonomian	Drs. Aris Windaryanto, MM
8	Kabid Pengelolaan Barang Daerah	Ir. Aris Riyanta, M.Si.
	Kasi Pengelolaan Barang Daerah	Edy Priyanto, S.E
	Kasi Pendayagunaan Barang Daerah	Drs. Bambang Isnawan
	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Drs. Sujadi
9	Kepala KPPD Kota Yogyakarta	Dra. Kartini Peni Mahanani, MM
	Kasubbag Tata Usaha	Dra. Wibiartiningsih
	Kasi Pendaftaran dan Penetapan	Totok Jaka Suwarta, S.H
	Kasi Pembukuan dan Penagihan	Ir. Naniek Pudjiastuti
10	Kepala KPPD Bantul	Samsuhadi, S.H
	Kasubbag Tata Usaha	Sunaryadi, S.H
	Kasi Pendaftaran dan Penetapan	Drs. Gito Sugito, MM
	Kasi Pembukuan dan Penagihan	Drs. Fuad Wahyu Hidayat, M.Si.
11	Kepala KPPD Kulon Progo	Gun Winarta, S.E
	Kasubbag Tata Usaha	Drs. Ardianto Edi Purwoko
	Kasi Pendaftaran dan Penetapan	Sri Lestari, S.E
	Kasi Pembukuan dan Penagihan	Bambang Wahyu Mulyono, S.E
12	Kepala KPPD Gunungkidul	Drs. Joko Prakoso
	Kasubbag Tata Usaha	Bambang Sulistyana, S.H., M.Hum.
	Kasi Pendaftaran dan Penetapan	Tadjul Ulum, SIP
	Kasi Pembukuan dan Penagihan	Pendi Pujo Bowo Leksono, S.E
13	Kepala KPPD Sleman	Rusmaji, S.H
	Kasubbag Tata Usaha	YB. Indraswari Wijaya, S.H
	Kasi Pendaftaran dan Penetapan	Budi Riyanto, S.H
	Kasi Pembukuan dan Penagihan	Sugeng Siswo Yuwono, S.H



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

NO	URAIAN	ANGGARAN 2009	REALISASI 2009	%	REALISASI 2008
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	494.847.565.500,00	541.192.265.769,60	109,37	525.185.354.193,35
4	Pendapatan Retribusi Daerah	32.591.963.785,00	34.785.228.680,17	106,73	29.259.898.275,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.736.868.047,00	20.094.713.175,83	101,81	12.481.050.738,67
6	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.340.112.179,00	49.073.343.449,14	173,16	65.946.008.446,61
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	575.516.509.511,00	645.145.551.075,74	112,10	632.872.311.654,13
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	70.777.125.691,00	70.922.769.996,59	100,21	70.549.425.301,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.543.068.000,00	2.758.403.387,00	108,47	11.347.787,00
12	Dana Alokasi Umum	523.919.950.000,00	523.919.948.000,00	100,00	511.773.394.400,00
13	Dana Alokasi Khusus	33.410.000.000,00	33.410.000.000,00	100,00	19.468.000.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	630.650.143.691,00	631.011.121.383,59	100,06	601.802.167.488,00
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus	-	0,00		
17	Dana Penyesuaian	-	0,00		314.880.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17)	-	-		314.880.000,00
19	Total Pendapatan Transfer (14 + 18)	630.650.143.691,00	631.011.121.383,59	100,06	602.117.047.488,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
21	Pendapatan Hitah	7.054.256.210,00	7.124.862.710,00	101,00	23.620.587.265,26
22	Pendapatan Dana Darurat	-	0,00		23.620.587.265,26
23	Pendapatan Lainnya	-	2.785.950.000,00		
24	Jml Lain-lain Pendapatan Yang Sah (21 s/d 23)	7.054.256.210,00	9.910.812.710,00	140,49	23.620.587.265,26
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)	1.213.220.909.412,00	1.286.067.485.169,33	106,00	1.258.609.946.407,39
26	BELANJA				
27	BELANJA OPERASI				
28	Belanja Pegawai	423.022.951.046,00	396.975.357.637,00	93,84	373.185.410.002,00
29	Belanja Barang dan Jasa	401.326.275.210,00	350.913.011.793,00	87,44	268.023.479.106,00
30	Belanja Bunga	45.778.400,00	45.778.400,00	100,00	54.965.900,00
31	Belanja Subsidi	-	-		
32	Belanja Hibah	17.015.222.300,00	15.550.887.300,00	91,39	293.366.860.485,00
33	Belanja Bantuan Sosial	116.393.128.300,00	96.290.500.384,00	82,73	77.120.813.192,00
34	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/Kota	79.488.400.000,00	76.388.400.000,00	96,10	46.900.000.000,00
35	Jumlah Belanja operasi (28 s/d 34)	1.037.291.755.256,00	936.163.935.514,00	90,25	1.058.651.528.685,00
36	BELANJA MODAL				
37	Belanja Tanah	14.540.928.000,00	12.771.312.542,00	87,83	21.735.536.313,00
38	Belanja Perlatan dan Mesin	39.247.460.855,00	30.209.608.823,00	76,97	31.886.416.936,00
39	Belanja Gedung dan Bangunan	43.829.923.650,00	38.992.227.553,00	88,96	89.509.522.403,00
40	Belanja Jalan, ligasi dan Jaringan	121.166.666.772,00	109.051.971.856,00	90,00	47.104.330.952,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.135.198.200,00	982.136.155,00	86,52	1.515.490.220,00
42	Belanja Aset Lainnya	1.126.854.467,00	930.794.500,00	82,60	82.428.900,00
43	Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)	221.047.031.944,00	192.938.051.429,00	87,28	191.833.725.724,00
44	BELANJA TIDAK TERDUGA				
45	Belanja Tidak Terduga	21.786.849.212,00	-	-	1.059.868.665,00
46	Jumlah Belanja Tidak terduga (45 s/d 45)	21.786.849.212,00	-	-	1.059.868.665,00
47	JUMLAH BELANJA (35+43+46)	1.280.125.636.412,00	1.129.101.986.943,00	88,20	1.251.545.123.074,00
48	TRANSFER				
49	Bagi Hasil Pajak Kepada Prov/ kab/ Kota/Pemdes	195.517.562.900,00	195.517.562.900,00	100,00	198.331.253.500,00
50	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	2.868.299.100,00	2.868.299.100,00	100,00	3.359.905.300,00
51	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	0,00		
52	Jml Transfer Eg Hsl Pajak (49 s/d 51)	198.385.862.000,00	198.385.862.000,00	100,00	201.741.158.800,00
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47+52)	1.478.511.498.412,00	1.327.487.848.943,00	89,79	1.453.286.281.874,00
54	SURPLUS / DEFISIT (25-53)	(265.290.589.000,00)	(41.420.363.773,67)	15,61	(194.676.335.466,61)

1	2	3	4	5	6
55	PEMBIAYAAN				
56	Penerimaan Daerah				
57	SILPA TA Sebelumnya	279.499.643.186,00	279.499.643.186,00	100,00	529.957.891.683,00
58	Pencairan Dana Cadangan				
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
60	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
62	Penerimaan Rutang Daerah	12.089.441.640,00	5.445.531.350,00	45,04	6.168.691.475,00
63	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	879.505.473,00	78,80	933.781.027,00
64	Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)	292.705.153.850,00	285.824.680.009,00	97,65	537.060.364.185,00
65	Pengeluaran Daerah				
66	Pembentukan Dana Cadangan	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	100,00	1.575.000.000,00
67	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.700.000.000,00	10.200.000.000,00	41,30	56.162.728.000,00
68	Pembayaran Pokok Utang	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
69	Pemberian Pinjaman Daerah				
70	Penyelesaian Kegiatan DPA-L				4.653.289.822,00
71	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan	1.039.564.850,00	1.039.564.850,00	100,00	393.367.710,00
72	Jumlah Pengeluaran (66 s/d 71)	27.414.564.850,00	12.914.564.850,00	47,11	62.884.385.532,00
73	Pembiayaan Netto (54-72)	265.290.589.000,00	272.910.115.159,00	102,87	474.175.978.653,00
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (54+73)		231.489.751.385,33		279.499.643.186,39

Yogyakarta, 31 Desember 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN STRUKTUR SAP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

AUDITED

NO	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	%	REALISASI 2009
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	539.653.461.500,00	634.710.019.496,80	117,61	541.192.265.769,60
4	Pendapatan Retribusi Daerah	31.556.968.029,00	32.836.503.243,89	104,05	34.785.228.680,57
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.953.742.568,00	26.333.869.884,77	97,70	20.094.713.175,83
6	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	40.717.239.787,00	46.321.683.743,57	113,76	49.073.343.449,74
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	638.881.411.884,00	740.202.076.369,03	115,86	645.145.551.075,74
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	84.155.762.023,00	82.386.124.407,00	97,90	70.922.769.996,59
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.936.010.650,00	5.435.867.715,00	110,13	2.758.403.387,00
12	Dana Alokasi Umum	527.471.247.000,00	527.471.247.000,00	100,00	523.919.948.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	11.384.100.000,00	11.384.100.000,00	100,00	33.410.000.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	627.947.119.673,00	626.677.339.122,00	99,80	631.011.121.383,59
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus	-	0,00		0,00
17	Dana Penyesuaian	3.890.500.000,00	2.093.050.000,00	53,80	0,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17)	3.890.500.000,00	2.093.050.000,00	53,80	-
19	Total Pendapatan Transfer (14 + 18)	631.837.619.673,00	628.770.389.122,00	99,51	631.011.121.383,59
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
21	Pendapatan Hibah	4.501.471.000,00	5.232.631.000,00	116,24	7.124.862.710,00
22	Pendapatan Dana Darurat	-	-		0,00
23	Pendapatan Lainnya	-	-		2.785.950.000,00
24	Jml Lain-lain Pendapatan Yang Sah (21 s/d 23)	4.501.471.000,00	5.232.631.000,00	116,24	9.910.812.710,00
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)	1.275.220.502.557,00	1.374.205.096.491,03	107,76	1.286.067.485.169,33
26	BELANJA				
27	BELANJA OPERASI				
28	Belanja Pegawai	455.347.124.347,00	422.486.005.710,00	92,78	396.975.357.637,00
29	Belanja Barang dan Jasa	405.181.835.763,00	355.885.366.573,00	87,83	350.913.011.793,00
30	Belanja Bunga	19.464.200,00	19.464.200,00	100,00	45.778.400,00
31	Belanja Subsidi	-	-		-
32	Belanja Hibah	89.895.291.845,00	89.895.291.845,00	100,00	15.550.887.300,00
33	Belanja Bantuan Sosial	98.866.347.612,00	88.513.099.537,00	89,53	96.290.500.384,00
34	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/Kota	56.967.000.000,00	56.967.000.000,00	100,00	76.388.400.000,00
35	Jumlah Belanja operasi (28 s/d 34)	1.106.277.063.767,00	1.013.766.227.865,00	91,64	936.163.935.514,00
36	BELANJA MODAL				
37	Belanja Tanah	35.397.600.000,00	22.302.477.164,00	63,01	12.771.312.542,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	28.628.247.640,00	26.082.150.459,00	91,11	30.209.608.823,00
39	Belanja Gedung dan Bangunan	43.872.586.878,00	35.581.010.890,00	81,10	38.992.227.553,00
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.182.997.430,00	38.056.934.610,00	75,84	109.051.971.856,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.436.699.600,00	1.287.679.908,00	89,63	982.136.155,00
42	Belanja Aset Lainnya	117.655.000,00	114.502.600,00	97,32	930.794.500,00
43	Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)	159.635.786.548,00	123.424.755.631,00	77,32	192.938.051.429,00
44	BELANJA TIDAK TERDUGA				
45	Belanja Tidak Terduga	3.171.060.905,00	2.735.672.140,00	86,27	-
46	Jumlah Belanja Tidak terduga (45 s/d 45)	3.171.060.905,00	2.735.672.140,00	86,27	-
47	JUMLAH BELANJA (35+43+46)	1.269.083.911.220,00	1.139.926.655.636,00	89,82	1.129.101.986.943,00
48	TRANSFER				
49	Bagi Hasil Pajak Kepada Prov/ kab/ Kota/Pemdes	211.990.205.240,00	211.990.205.235,00	100,00	195.517.562.900,00
50	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	2.677.197.235,00	2.677.197.235,00	100,00	2.868.299.100,00
51	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	0,00		0,00
52	Jml Transfer Bg Hsl Pajak (49 s/d 51)	214.667.402.475,00	214.667.402.470,00	100,00	198.385.862.000,00
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47+52)	1.483.751.313.695,00	1.354.594.058.106,00	91,30	1.327.487.848.943,00
54	SURPLUS / DEFISIT (25-53)	(208.530.811.138,00)	19.611.038.385,03	(9,40)	(41.420.363.773,67)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	%	REALISASI 2009
1	2	3	4	5	6
55	PEMBIAYAAN				
56	Penerimaan Daerah				
57	SILPA TA Sebelumnya	231.489.751.385,33	231.489.751.385,33	100,00	279.499.643.186,00
58	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
60	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	16.565.000.000,00	23.947.092.976,30	144,56	-
62	Penerimaan Piutang Daerah	8.503.500.000,00	-	-	5.445.531.350,00
63	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	1.131.510.827,30	101,38	879.505.473,00
64	Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)	257.674.320.409,33	256.568.355.188,33	99,57	285.824.680.009,00
65	Pengeluaran Daerah				
66	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	1.575.000.000,00
67	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.187.852.067,00	21.187.852.067,00	100,00	10.200.000.000,00
68	Pembayaran Pokok Utang	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100.000.000,00
69	Pemberian Pinjaman Daerah	27.915.000.000,00	22.865.000.000,00	81,91	-
70	Penyelesaian Kegiatan CPA-L	-	-	-	-
71	Pembayaran kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	-	-	-	1.039.564.850,00
72	Jumlah Pengeluaran (66 s/d 71)	49.152.852.067,00	44.102.852.067,00	89,73	12.914.564.850,00
73	Pembiayaan Netto (64-72)	208.521.468.342,33	212.465.503.121,33	101,89	272.910.115.159,00
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (54+73)		232.076.541.506,36		231.489.751.385,33

Yogyakarta, 31 Desember 2010
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN STRUKTUR SAP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	%	REALISASI 2010
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASU DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	655.306.917.953,00	735.226.105.916,20	112,20	634.710.019.496,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah	33.575.099.081,00	35.985.658.458,15	107,18	32.836.503.243,89
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.200.366.955,00	28.961.383.472,76	99,18	26.333.869.884,77
6	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	57.035.064.000,00	66.939.731.505,76	117,37	46.321.683.743,57
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	775.117.447.989,00	867.112.885.352,87	111,87	740.202.076.369,03
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	69.720.877.327,00	75.967.201.558,00	108,96	82.386.124.407,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.144.120.479,00	6.070.521.495,00	118,01	5.435.867.715,00
12	Dana Alokasi Umum	620.812.328.000,00	620.812.328.000,00	100,00	527.471.247.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	19.489.600.000,00	19.489.600.000,00	100,00	11.384.100.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	715.166.925.806,00	722.339.653.053,00	101,00	626.677.339.122,00
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus	-	0,00		0,00
17	Dana Penyesuaian	9.142.321.000,00	9.142.321.000,00	100,00	2.093.050.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17)	9.142.321.000,00	9.142.321.000,00	100,00	2.093.050.000,00
19	Total Pendapatan Transfer (14 + 18)	724.309.246.806,00	731.481.974.053,00	100,99	628.770.389.122,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
21	Pendapatan Hibah	5.037.565.500,00	6.315.972.000,00	125,38	5.232.631.000,00
22	Pendapatan Dana Darurat	-	-		0,00
23	Pendapatan Lainnya	-	-		0,00
24	Jml Lain-lain Pendapatan Yang Sah (21 s/d 23)	5.037.565.500,00	6.315.972.000,00	125,38	5.232.631.000,00
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)	1.504.464.260.295,00	1.604.910.831.405,87	106,68	1.374.205.096.491,03
26	BELANJA				
27	BELANJA OPERASI				
28	Belanja Pegawai	525.361.488.442,00	498.752.591.040,00	94,94	422.486.005.710,00
29	Belanja Barang dan Jasa	426.372.440.757,00	374.323.534.963,00	87,79	355.885.366.573,00
30	Belanja Bunga	-	-		19.464.200,00
31	Belanja Subsidi	-	-		
32	Belanja Hibah	17.943.134.000,00	17.578.561.700,00	97,97	89.895.291.845,00
33	Belanja Bantuan Sosial	148.359.261.200,00	114.820.604.720,00	77,39	88.513.099.537,00
34	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/Kota	150.394.530.362,00	145.929.020.362,00	97,03	56.967.000.000,00
35	Jumlah Belanja operasi (28 s/d 34)	1.268.430.854.761,00	1.151.404.312.785,00	90,77	1.013.766.227.865,00
36	BELANJA MODAL				
37	Belanja Tanah	20.006.000.000,00	16.949.991.130,00	84,72	22.302.477.164,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	23.105.016.152,00	21.452.555.619,00	92,85	26.082.150.459,00
39	Belanja Gedung dan Bangunan	55.690.351.885,00	51.371.196.438,00	92,24	35.581.010.890,00
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.166.709.139,00	45.164.307.321,00	86,58	38.056.934.610,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.476.105.700,00	1.244.652.390,00	84,32	1.287.679.908,00
42	Belanja Aset Lainnya	8.337.730.600,00	6.611.130.080,00	79,29	114.502.600,00
43	Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)	160.781.913.476,00	142.793.832.978,00	88,81	123.424.755.631,00
44	BELANJA TIDAK TERDUGA				
45	Belanja Tidak Terduga	11.614.461.535,00	23.248.882,00	0,20	2.735.672.140,00
46	Jumlah Belanja Tidak terduga (45 s/d 45)	11.614.461.535,00	23.248.882,00	0,20	2.735.672.140,00
47	JUMLAH BELANJA (35+43+46)	1.440.827.229.772,00	1.294.221.394.645,00	89,82	1.139.926.655.636,00
48	TRANSFER				
49	Bagi Hasil Pajak Kepada Prov/ kab/ Kota/Pemdes	261.779.486.000,00	261.779.486.000,00	100,00	211.990.205.235,00
50	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	3.485.463.000,00	3.485.463.000,00	100,00	2.677.197.235,00
51	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	2.782.391.000,00	2.782.391.000,00	100,00	0,00
52	Jml Transfer Bg Hsl Pajak (49 s/d 51)	268.047.340.000,00	268.047.340.000,00	100,00	214.667.402.470,00
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47+52)	1.708.874.569.772,00	1.562.268.734.645,00	91,42	1.354.594.058.106,00
54	SURPLUS / DEFISIT (25-53)	(204.410.309.477,00)	42.642.096.760,87	(20,86)	19.611.038.385,03

NO	URAIAN	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	%	REALISASI 2010
1	2	3	4	5	6
55	PEMBIAYAAN				
56	Penerimaan Daerah				
57	SILPA TA Sebelumnya	232.076.541.506,00	232.076.541.506,36	100,00	231.489.751.385,33
58	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
60	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	19.124.600.000,00	20.885.008.000,00	109,20	23.947.092.976,00
62	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
63	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.034,00	1.270.414.276,00	113,83	1.131.510.827,00
64	Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)	252.317.210.530,00	254.231.963.782,36	100,76	256.568.355.188,33
65	Pengeluaran Daerah				
66	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
67	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	21.187.852.067,00
68	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	50.000.000,00
69	Pemberian Pinjaman Daerah	43.159.572.482,00	23.225.008.000,00	53,81	22.865.000.000,00
70	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	2.147.328.571,00	1.519.846.900,00	70,78	-
71	Pembayaran kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	-	-	-	-
72	Jumlah Pengeluaran (66 s/d 71)	47.906.901.053,00	27.344.846.900,00	57,08	44.102.852.067,00
73	Pembiayaan Netto (64-72)	204.410.309.477,00	226.887.116.882,36	111,00	212.465.503.121,33
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (54+73)		269.529.213.643,23		232.076.541.506,36

Yogyakarta, 31 Desember 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN STRUKTUR SAP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

NO	URAIAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	%	REALISASI 2011
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	805.095.980.000,00	871.630.605.363,00	108,26	735.226.105.916,20
4	Pendapatan Retribusi Daerah	32.149.648.150,00	34.115.157.619,03	106,11	35.985.658.458,15
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.572.913.845,02	35.492.532.563,21	99,77	28.961.383.472,76
6	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.139.246.800,00	62.824.830.237,09	139,18	66.939.737.505,76
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	917.957.788.795,02	1.004.063.125.812,33	109,38	867.112.885.352,87
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	92.828.718.781,00	112.691.591.066,00	121,40	75.967.201.558,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.722.999.973,00	5.743.297.785,00	121,60	6.070.523.495,00
12	Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	757.056.696.000,00	100,00	620.812.328.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	19.052.740.000,00	100,00	19.489.600.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	873.661.154.754,00	894.544.324.851,00	102,39	722.339.653.053,00
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus	-	0,00		0,00
17	Dana Penyesuaian	280.790.940.000,00	266.557.880.000,00	94,93	9.142.321.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17)	280.790.940.000,00	266.557.880.000,00	94,93	9.142.321.000,00
19	Total Pendapatan Transfer (14 + 18)	1.154.452.094.754,00	1.161.102.204.851,00	100,58	731.481.974.053,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
21	Pendapatan Hibah	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	113,73	6.315.972.000,00
22	Pendapatan Dana Darurat	-	-		0,00
23	Pendapatan Lainnya	-	-		0,00
24	Jml Lain-lain Pendapatan Yang Sah (21 s/d 23)	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	113,73	6.315.972.000,00
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)	2.078.185.750.549,02	2.171.734.307.663,33	104,50	1.604.910.831.405,87
26	BELANJA				
27	BELANJA OPERASI				
28	Belanja Pegawai	604.610.399.707,60	572.023.717.212,00	94,61	498.752.591.040,00
29	Belanja Barang dan Jasa	569.954.139.741,50	482.062.123.930,00	84,58	374.323.534.963,00
30	Belanja Bunga	-	-		-
31	Belanja Subsidi	-	-		-
32	Belanja Hibah	406.004.124.000,00	369.002.245.000,00	90,89	17.578.561.700,00
33	Belanja Bantuan Sosial	24.153.330.000,00	24.153.330.000,00	100,00	114.820.604.720,00
34	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/Kota	81.669.345.362,00	74.683.445.362,00	91,45	145.929.020.362,00
35	Jumlah Belanja operasi (28 s/d 34)	1.686.391.338.811,10	1.521.924.861.504,00	90,25	1.151.404.312.785,00
36	BELANJA MODAL				
37	Belanja Tanah	54.975.752.675,00	29.675.271.236,00	53,98	16.949.991.130,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	64.590.314.928,00	55.983.530.179,00	86,67	21.452.555.619,00
39	Belanja Gedung dan Bangunan	101.547.663.720,00	76.882.359.043,00	75,71	51.371.196.438,00
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.784.054.215,00	51.869.478.857,00	91,35	45.164.307.321,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.704.510.985,50	1.543.435.555,00	90,55	1.244.652.390,00
42	Belanja Aset Lainnya	477.033.300,00	465.907.530,00	97,67	6.611.130.080,00
43	Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)	280.079.329.823,50	216.419.982.440,00	77,27	142.793.832.978,00
44	BELANJA TIDAK TERDUGA				
45	Belanja Tidak Terduga	4.360.852.100,00	1.172.560.543,00	26,89	23.248.882,00
46	Jumlah Belanja Tidak terduga (45 s/d 45)	4.360.852.100,00	1.172.560.543,00	26,89	23.248.882,00
47	JUMLAH BELANJA (35+43+46)	1.970.831.520.734,60	1.739.517.404.487,00	88,26	1.294.221.394.645,00
48	TRANSFER				
49	Bagi Hasil Pajak Kepada Prov/ kab/ Kota/Pemdes	310.852.534.000,00	310.852.534.000,00	100,00	261.779.486.000,00
50	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	3.456.021.000,00	3.456.021.000,00	100,00	3.485.463.000,00
51	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	0,00	#DIV/0!	2.782.391.000,00
52	Jml Transfer Bg Hsl Pajak (49 s/d 51)	314.308.555.000,00	314.308.555.000,00	100,00	268.047.340.000,00
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47+52)	2.285.140.075.734,60	2.053.825.959.487,00	89,88	1.562.268.734.645,00
54	SURPLUS / DEFISIT (25-53)	(206.954.325.185,58)	117.908.348.176,33	(56,97)	42.642.096.760,87

NO	URAIAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	%	REALISASI 2011
1	2	3	4	5	6
55	PEMBIAYAAN				
56	Penerimaan Daerah				
57	SILPA TA Sebelumnya	269.529.213.643,53	269.529.213.643,23	100,00	232.076.541.506,36
58	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-
60	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-		-
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	#DIV/0!	20.885.008.000,00
62	Penerimaan Piutang Daerah	12.084.619.518,00	23.019.937.048,00		-
63	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	1.059.442.165,00	94,93	1.270.414.276,00
64	Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)	282.729.902.185,53	293.608.592.856,23	103,85	254.231.963.782,36
65	Pengeluaran Daerah				
66	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-
67	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.775.577.000,00	32.275.000.000,00	42,59	2.600.000.000,00
68	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-
69	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	#DIV/0!	23.225.000.000,00
70	Penyelesaian Kegiatan CPA-L	-	-	#DIV/0!	1.519.846.900,00
71	Pembayaran kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	-	-		-
72	Jumlah Pengeluaran (66 s/d 71)	75.775.577.000,00	32.275.000.000,00	42,59	27.344.846.900,00
73	Pembiayaan Netto (64-72)	206.954.325.185,53	261.333.592.856,23	126,28	226.887.116.882,36
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (54+73)		379.241.941.012,56		269.529.213.643,23

Yogyakarta, 31 Desember 2012
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2013	(%)	Realisasi 2012
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.658.370.090.569,00	2.582.162.081.976,81	97,13	(2.171.734.307.663,33)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.151.006.344.797,00	1.215.208.068.069,81	105,58	(1.004.063.125.812,33)
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1.021.820.720.000,00	1.063.314.117.923,00	104,06	871,630,605,393.00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	35.715.569.098,00	38.043.014.004,85	106,52	34,115,157,619.03
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipsahkan	40.411.469.192,00	40.817.517.188,12	101,00	35,492,532,563.21
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.058.526.507,00	73.033.418.953,84	137,65	62,824,830,237.09
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.498.548.269.522,00	1.356.183.111.037,00	90,50	(1.161.102.204.851,00)
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	964.396.534.022,00	957.561.850.914,00	99,29	894,544,324,851.00
1.2.1.1.	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.736.872.088,00	85.934.524.665,00	89,76	112,691,591,066.00
1.2.1.2.	b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	5.828.993.934,00	8.796.658.249,00	150,91	5,743,297,785.00
1.2.1.3.	c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	100,00	757,056,696,000.00
1.2.1.4.	d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	34.495.600.000,00	34.495.900.000,00	100,00	19,052,740,000.00
1.2.2.	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	534.151.735.500,00	398.621.260.123,00	74,63	266,557,880,000.00
1.2.2.1.	a. Dana Otonomi Khusus	231.392.653.500,00	115.696.326.500,00	50,00	0.00
1.2.2.2.	b. Dana Penyesuaian	302.759.082.000,00	282.924.933.623,00	93,45	266,557,880,000.00
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	0.00
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0.00
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	0.00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.815.476.250,00	10.770.902.870,00	122,18	(6.568.977.000,00)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.815.476.250,00	10.770.902.870,00	122,18	6,568,977,000.00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0.00
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.658.370.090.569,00	2.582.162.081.976,81	97,13	2.171.734.307.663,33
2.	BELANJA DAERAH	2.917.270.974.520,00	2.509.672.985.186,35	86,03	2.053.825.959.467,00
2.1.	BELANJA OPERASI	2.124.796.330.908,00	1.763.574.900.288,57	83,00	1.521.924.861.484,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	687.347.027.974,00	634.828.730.880,00	92,36	572,023,717,192.00
2.1.2.	Belanja Barang	788.899.618.313,00	555.967.321.646,57	70,47	482,062,123,930.00
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	0.00
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	0.00
2.1.5.	Belanja Hibah	500.494.194.950,00	437.243.898.900,00	87,36	369,002,245,000.00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	23.062.809.309,00	12.509.468.500,00	54,24	24,153,330,000.00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	124.994.680.362,00	123.025.480.362,00	98,42	74,683,445,362.00

Halaman : 2

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2013	(%)	Realisasi 2012
1	2	3	4	5	6
2.2.	BELANJA MODAL	413.179.214.341,00	369.195.794.039,00	89,40	216.419.982.440,00
2.2.1.	Belanja Tanah	30.909.555.500,00	28.310.643.457,00	91,59	29.675.271.296,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan mesin	96.008.802.145,00	78.059.776.458,00	81,30	55.983.530.179,00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	107.155.685.047,00	93.938.285.734,00	87,67	76.882.359.043,00
2.2.4.	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	173.361.426.139,00	164.544.588.860,00	94,91	51.869.478.867,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap lainnya	4.695.051.270,00	3.597.456.530,00	76,62	1.543.435.555,00
2.2.6.	Belanja Aset, Lainnya	1.048.694.240,00	945.043.000,00	90,12	485.907.500,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.591.138.412,00	-	-	1.172.560.543,00
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	2.591.138.412,00	-	-	1.172.560.543,00
	JUMLAH	2.540.568.683.662,00	2.132.970.694.327,57	83,96	1.739.517.404.467,00
2.4.	TRANSFER	376.702.290.859,00	376.702.290.858,78	100,00	314.308.555.000,00
2.4.1.	Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	376.702.290.859,00	376.702.290.858,78	100,00	314.308.555.000,00
2.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	376.702.290.859,00	376.702.290.858,78	100,00	310.852.534.000,00
2.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	3.456.021.000,00
2.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(258.900.883.952,00)	72.489.096.790,46	28,00	117.908.348.196,33
3.	PEMBIAYAAN	258.900.883.952,00	308.444.650.191,84	119,14	261.333.592.856,23
3.1.	PENERIMAAN DAERAH	385.339.434.228,00	403.038.600.467,84	104,59	293.608.592.856,23
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	379.241.941.053,00	379.241.941.052,56	100,00	269.529.213.643,23
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	3.224.600.842,00	3.224.600.842,28	100,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	0,00
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.506.301.320,00	20.205.468.560,00	806,19	23.019.937.048,00
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	366.591.013,00	366.590.013,00	100,00	1.059.442.165,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	385.339.434.228,00	403.038.600.467,84	104,59	293.608.592.856,23
3.2.	PENGELUARAN DAERAH	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	74,81	32.275.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	74,81	32.275.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan DPA - L	-	-	-	0,00
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	-	-	-	0,00

Halaman : 3

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2013	(%)	Realisasi 2012
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	74,81	32.275.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	258.900.883.952,00	308.444.650.191,84	119,14	261.333.592.856,23

NIP :

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Menggunakan SPSS *Statistics* 19

a. Hasil Estimasi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.985E10	1.237E11		-.726	.520
Pajak_Daerah	.389	.156	.820	2.483	.089

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber: Data diolah (April 2014)

b. Hasil Estimasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.152E12	6.154E11		-1.872	.158
Retribusi_Daerah	38.713	17.485	.788	2.214	.114

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber: Data diolah (April 2014)

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Pajak Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.673	.564	6.41761E10

a. Predictors: (Constant), Pajak_Daerah

Sumber: Data diolah (April 2014)

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Retribusi Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.620	.494	6.91135E10

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah

Sumber: Data diolah (April 2014)

Analisis Data Manual (pembulatan dalam ratusan juta rupiah)

a. Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tahun 2009-2013

1. Regresi Linier Sederhana

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp) - X	Realisasi Belanja Modal (Rp) - Y	XY	X ²	Y ²
2009	541,00	193,00	104.413	Rp 292.681	Rp 37.249
2010	635,00	123,00	78.105	Rp 403.225	Rp 15.129
2011	735,00	143,00	105.105	Rp 540.225	Rp 20.449
2012	872,00	216,00	188.352	Rp 760.384	Rp 46.656
2013	1.063,00	369,00	392.247	Rp 1.129.969	Rp 136.161
Jumlah	Rp 3.846,00	Rp 1.044,00	Rp868.222,00	Rp3.126.484,00	Rp255.644,00
Rata2	Rp 769,20	Rp 208,80			

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Rp 1.044,00} & = & 5a + \text{Rp 3.846,00 } b \\
 \text{Rp 868.222,00} & = & \text{Rp 3.846,00 } a + \text{Rp 3.126.484,00 } b
 \end{array}
 \quad \left| \begin{array}{l} \times 3.846 \\ \times 5 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Rp 4.015.224,00} & = & \text{Rp 19.230,00 } a + \text{Rp 14.791.716,00 } b \\
 \text{Rp 4.341.110,00} & = & \text{Rp 19.230,00 } a + \text{Rp 15.632.420,00 } b \\
 \hline
 \text{Rp (325.886,00)} & = & \text{Rp (840.704,00) } b \\
 b & = & 0,387634649
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Rp1.044,00} & = & 5 a + \text{Rp3.846,00 } b \\
 \text{Rp1.044,00} & = & 5 a + \text{Rp3.846,00 (0,387634649)} \\
 \text{Rp1.044,00} & = & 5 a + \text{Rp1.490,84} \\
 5 a & = & \text{Rp (446,84)} \\
 a & = & \text{Rp (89,37)}
 \end{array}$$

$$Y = a + bX$$

$$BM = - 89,37 + 0,38 PD$$

2. Koefisien Determinasi (R^2)

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = \frac{5 \times 868,222 - (3,846)(1,044)}{\sqrt{5(3,126,484) - (3,846)^2} \times \sqrt{5(255,644) - (1,044)^2}}$$

$$r = \frac{4,341,110 - 4,015,224}{916,899122 - 433,92}$$

$$r = \frac{325,886}{397,858.16}$$

$$r = 0,819100967$$

$$R^2 = 0,670926394$$

3. Uji Statistik T

$$r_{\text{hitung}} = 0,819100967$$

r tabel dengan taraf kesalahan 5% , N = 5 adalah 0,6694

r hitung > r tabel maka H_0 ditolak

H_0 : $\beta_1 \neq 0$ yang berarti tidak ada pengaruh

Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap belanja modal.

b. Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset DIY tahun 2009-2013

1. Regresi Linier Sederhana

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp) - X	Realisasi Belanja Modal (Rp) - Y	XY	X ²	Y ²
2009	35,00	193,00	6.755	1.225	37.249
2010	33,00	123,00	4.059	1.089	15.129
2011	36,00	143,00	5.148	1.296	20.449
2012	34,00	216,00	7.344	1.156	46.656
2013	38,00	369,00	14.022	1.444	136.161
Jumlah	176,00	1.044,00	37.328,00	6.210,00	255.644,00
Rata2	35,20	208,80			

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Rp } 1.044,00 & = & 5a + \text{Rp } 176,00 \\
 \text{Rp } 37.328,00 & = & \text{Rp } 176,00 a + \text{Rp } 6.210,00 b
 \end{array}
 \left| \begin{array}{l} \times 176 \\ \times 5 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Rp } 183.744,00 & = & \text{Rp } 880,00 a + \text{Rp } 30.976,00 b \\
 \text{Rp } 186.640,00 & = & \text{Rp } 880,00 a + \text{Rp } 31.050,00 b \\
 \hline
 \text{Rp } (2.896,00) & = & \text{Rp } (74) b \\
 b & = & 39,13513514
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Rp } 1.044,00 & = & 5a + \text{Rp } 176,00 b \\
 \text{Rp } 1.044,00 & = & 5a + \text{Rp } 176,00 (39,13513514) \\
 \text{Rp } 1.044,00 & = & 5a + \text{Rp } 6.887,783784 \\
 5a & = & \text{Rp } (5.843,783784) \\
 a & = & \text{Rp } (1.168,756757)
 \end{array}$$

$$Y = a + bX$$

$$BM = - 1.168,75 + 39,13 RD$$

2. Koefisien Determinasi (R^2)

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = \frac{5 \times 37.328 - (176)(1.044)}{\sqrt{5(6.210) - (176)^2} \times \sqrt{5(255.644) - (1.044)^2}}$$

$$r = \frac{186.640 - 183.744}{8,602325267 \times 433,9170428}$$

$$r = \frac{2.896}{3.732,69554}$$

$$r = 0,78$$

$$R^2 = 0,6019383$$

3. Uji Statatistik T

$$r \text{ hitung} = 0,78$$

r tabel dengan taraf kesalahan 5% , N = 5 adalah 0,6694

r hitung > r tabel maka H_A ditolak

H_A : $b_i \neq 0$ yang berarti tidak ada pengaruh

Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja modal.

TABEL 15 : TABEL t dan r product moment dengan signifikansi 5%

df	Tabel t one tail	Tabel t two tail	Tabel r one tail	Tabel r two tail
1	6.3138	12.7062	0.9877	0.9969
2	2.9200	4.3027	0.9000	0.9500
3	2.3534	3.1824	0.8054	0.8783
4	2.1318	2.7764	0.7293	0.8114
5	2.0150	2.5706	0.6694	0.7545
6	1.9432	2.4469	0.6215	0.7067
7	1.8946	2.3646	0.5822	0.6664
8	1.8595	2.3060	0.5494	0.6319
9	1.8331	2.2622	0.5214	0.6021
10	1.8125	2.2281	0.4973	0.5760
11	1.7959	2.2010	0.4762	0.5529
12	1.7823	2.1788	0.4575	0.5324
13	1.7709	2.1604	0.4409	0.5140
14	1.7613	2.1448	0.4259	0.4973
15	1.7531	2.1314	0.4124	0.4821
16	1.7459	2.1199	0.4000	0.4683
17	1.7396	2.1098	0.3887	0.4555
18	1.7341	2.1009	0.3783	0.4438
19	1.7291	2.0930	0.3687	0.4329
20	1.7247	2.0860	0.3598	0.4227
21	1.7207	2.0796	0.3515	0.4132
22	1.7171	2.0739	0.3438	0.4044
23	1.7139	2.0687	0.3365	0.3961
24	1.7109	2.0639	0.3297	0.3882
25	1.7081	2.0595	0.3233	0.3809
26	1.7056	2.0555	0.3172	0.3739
27	1.7033	2.0518	0.3115	0.3673
28	1.7011	2.0484	0.3061	0.3610
29	1.6991	2.0452	0.3009	0.3550
30	1.6973	2.0423	0.2960	0.3494
31	1.6955	2.0395	0.2913	0.3440
32	1.6939	2.0369	0.2869	0.3388
33	1.6924	2.0345	0.2826	0.3338
34	1.6909	2.0322	0.2785	0.3291
35	1.6896	2.0301	0.2746	0.3246
36	1.6883	2.0281	0.2709	0.3202
37	1.6871	2.0262	0.2673	0.3160
38	1.6860	2.0244	0.2638	0.3120
39	1.6849	2.0227	0.2605	0.3081
40	1.6839	2.0211	0.2573	0.3044
41	1.6829	2.0195	0.2542	0.3008
42	1.6820	2.0181	0.2512	0.2973
43	1.6811	2.0167	0.2483	0.2940
44	1.6802	2.0154	0.2455	0.2907
45	1.6794	2.0141	0.2429	0.2876
46	1.6787	2.0129	0.2403	0.2845
47	1.6779	2.0117	0.2377	0.2816
48	1.6772	2.0106	0.2353	0.2787
49	1.6766	2.0096	0.2329	0.2759
50	1.6759	2.0086	0.2306	0.2732
51	1.6753	2.0076	0.2284	0.2706
52	1.6747	2.0066	0.2262	0.2681
53	1.6741	2.0057	0.2241	0.2656
54	1.6736	2.0049	0.2221	0.2632
55	1.6730	2.0040	0.2201	0.2609
56	1.6725	2.0032	0.2181	0.2586
57	1.6720	2.0025	0.2162	0.2564
58	1.6716	2.0017	0.2144	0.2542
59	1.6711	2.0010	0.2126	0.2521
60	1.6706	2.0003	0.2108	0.2500
61	1.6702	1.9996	0.2091	0.2480
62	1.6698	1.9990	0.2075	0.2461
63	1.6694	1.9983	0.2058	0.2441
64	1.6690	1.9977	0.2042	0.2423
65	1.6686	1.9971	0.2027	0.2404
66	1.6683	1.9966	0.2012	0.2387
67	1.6679	1.9960	0.1997	0.2369
68	1.6676	1.9955	0.1982	0.2352
69	1.6672	1.9949	0.1968	0.2335
70	1.6669	1.9944	0.1954	0.2319
71	1.6666	1.9939	0.1940	0.2303
72	1.6663	1.9935	0.1927	0.2287
73	1.6660	1.9930	0.1914	0.2272